

II. STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan analisis terhadap penelitian atau karya terdahulu yang memiliki relevansi dengan konsep atau operasional yang dimiliki perupa untuk meningkatkan kualitas penciptaan karya seni rupa. Perupa memilih dua penulisan tugas akhir sebagai referensi tinjauan pustaka, yang pertama berjudul “*Ambient* Sebagai Media Kampanye Keselamatan Bagi Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Timur” (Anwar, 2018) (Anwar, Chaerul. 2018. *Ambient* Sebagai Media Kampanye Keselamatan Bagi Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Timur. Fakultas Bahasa dan Seni, Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Universitas Negeri Jakarta).

Tugas akhir berjudul “*Ambient* Sebagai Media Kampanye Keselamatan Bagi Pengendara Sepeda Motor di Jakarta Timur” oleh Chaerul Anwar, sama-sama membuat sebuah karya yang penempatannya di ruang publik dan juga memiliki konsep kampanye sosial yang diharapkan dapat berdampak kepada kehidupan masyarakat luas.

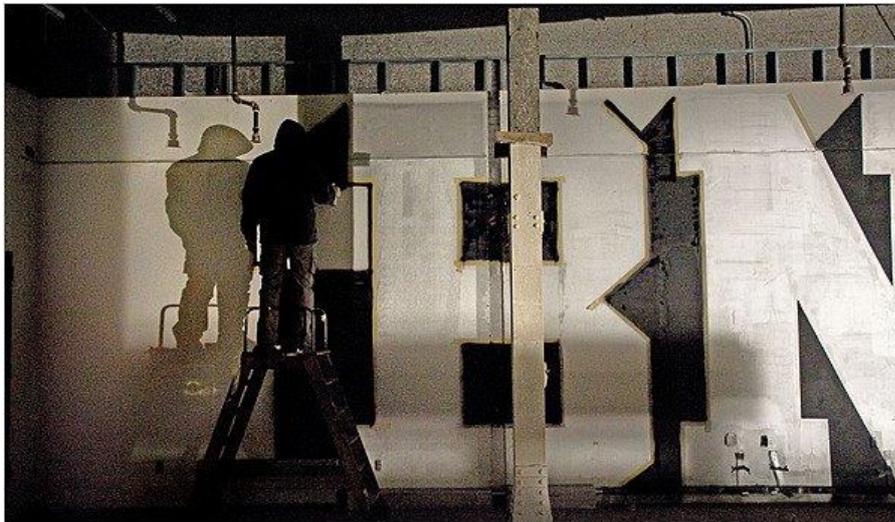
Tinjauan pustaka kedua adalah skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Moral Dalam Teks Pancasila dan Relevansinya Dengan Materi pendidikan Akhlak” (Wahidah, 2014) (Hidayatul Wahidah, Nurul. 2014. Nilai-Nilai Moral Dalam Teks Pancasila dan Relevansinya Dengan Materi pendidikan Akhlak. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) perupa memilih skripsi karya Nurul Hidayatul Wahidah dikarenakan fokus permasalahan yang diangkat tentang Nilai-Nilai Teks Pancasila, yang dimana

perupa sendiri memilih tema tersebut untuk diterapkan pada karya tugas akhir perupa.

B. Referensi Praktik

Proses berkarya perupa terinspirasi dari beberapa referensi praktik seniman, referensi praktik ini menjadi pengaruh dalam proses penciptaan karya perupa. Tidak hanya terinspirasi perupa juga mengamati cara kerja mereka saat melakukan proses berkarya, sehingga perupa dapat menerapkan proses tersebut dalam penciptaan karya perupa.

1. BNE



Gambar 2. BNE di *Manhattan Warehouse Wall*
(Sumber: Joshua Bright www.nytimes.com) 2017

Tidak banyak yang mengetahui secara pasti siapakah BNE atau apa artinya BNE, namun banyak yang beranggapan BNE adalah inisial dari nama seniman anonim asal San Francisco USA. Sosok yang terkenal lewat stiker bertuliskan tiga huruf yaitu BNE ini sudah mulai menginvasi ruang publik kota besar di Amerika

Serikat pada akhir tahun 90-an dan semenjak itu stiker yang ia tempel menjadi perbincangan karena jumlahnya yang banyak dan juga tersebar di mana-mana. Banyak media yang memberitakan tentang stiker BNE ini sampai pada tahun 2006 Gubernur negara bagian San Francisco yaitu Gavin Newsom mengadakan sayembara dimana setiap orang yang dapat memberi tahu atau menangkap BNE berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar \$2,500.



Gambar 3. *Sticker* BNE di fasilitas publik
(Sumber: www.highsnobiety.com) 2017

Tidak hanya di Amerika Serikat, seiring berjalannya waktu ia pun BNE pun memperluas jangkauan invasinya ke negara-negara lain di antaranya Canada, Asia, Australia, Europe, Amerika Selatan, dan pada tahun 2015 lalu ia sempat mengunjungi Indonesia dan berkolaborasi bersama seniman lokal bernama Pak Nur. Itu bukan kali pertama kalinya BNE berkunjung ke Indonesia, karena pada tahun 2010 ia sempat berkunjung ke Indonesia tepatnya di Jakarta dan bertemu dengan seorang ibu pengemis saat sedang melakukan aksinya di jalan, ia berbincang dengan ibu tersebut dan berujung dengan perbincangan soal krisis air bersih.

Berawal dari hal tersebut BNE mulai meriset tentang krisis air bersih yang terjadi di dunia, dan pada tahun 2011 ia membuat sebuah organisasi non profit yang menitik beratkan masalah krisis air di dunia. Kemudian ia membuat sebuah proyek dimana ia menjadi inisiator untuk setiap orang yang mau mendonasikan dana nya untuk akses air bersih bagi kalangan yang kurang beruntung. Tidak hanya itu BNE juga mengajak seniman-seniman lain untuk berpartisipasi mendonasikan karya mereka yang nantinya akan di produksi dan dijual, dimana semua profit dari penjualan tersebut digunakan sebagai dana penyaluran air bersih ke setiap penjuru daerah di dunia yang membutuhkan air bersih.



Gambar 4. Karya donasi Shepard Fairey (OBEY) untuk BNE

(Sumber: www.obeygiant.com) 2017

Seperti di kutip dari wawancara Forbes.com (www.forbes.com, 2012) BNE berpendapat bahwa proyek yang sedang ia kerjakan adalah proyek seni terbesar yang pernah ia kerjakan. *“As far as art goes, I consider this NPO a work of art. I can only lay the groundwork though, it's up to the people to recognize this project's huge potential and help it grow into the greatest piece of art ever created.”*



Gambar 5. Warga penerima donasi BNE
(Sumber: www.bnewater.org) 2017

2. Kidult



Gambar 6. KIDULT

(Sumber: www.kidultone.com) 2017

Kidult merupakan seniman yang berbasis di kota Paris Prancis. Sosok Kidult yang sangat misterius dan selalu memakai topeng bergambar tengkorak beberapa tahun ini melakukan banyak aksi dengan menyerang dinding-dinding toko terkenal yang sebagian besar berada di Paris dengan semprotan pemadam (APAR) penuh berisi cat. Kidult memilih Merek-merek terkenal seperti Agnès B., JCDC, Colette, Kenzo atau yang baru-baru ini adalah Hermes dan Louis Vuitton yang menjadi korban aksinya.

Kidult menggunakan seni sebagai senjata untuk memerangi kaum-kaum kapitalis, bagi kidult kaum-kaum kapitalis hanya mengambil keuntungan semata untuk kepentingan yang jauh dari kata sosialis, melainkan mereka menyumbang

lebih dari 50% keuntungan untuk menyokong dana perang brutal, baik perang fisik maupun memerangi lewat media. Kidult selalu membuat “video campaign” tentang aksi-aksi nya di publik dan mengunggahnya ke kanal website yang sekaligus sebagai wadah nya untuk menyebarkan pesan yang ia perjuangkan. Karya yang ia buat pun beragam di antaranya poster (*wheat paste*), *Graffiti*, *stencil*, instalasi, sablon diatas kaos yang selalu dibagikan gratis, dan akhir-akhir ini ia membuat 10 patung berbentuk tulang rusuk manusia yang berbentuk seperti tabung pemadam api, patung ini ia sebar di kota kota besar di seluruh dunia, dan lagi-lagi patung ini ia bagikan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang menemukannya.

Sosok yang kontroversi ini mempunyai sebuah proyek yang dinamakan sebagai Kidult Army, Kidult Army merupakan jejaring yang diciptakan Kidult secara global dan ikut berkontribusi dan berjuang bersama menyuarakan protes terhadap kapitalis dengan menggunakan seni sebagai senjata utamanya.



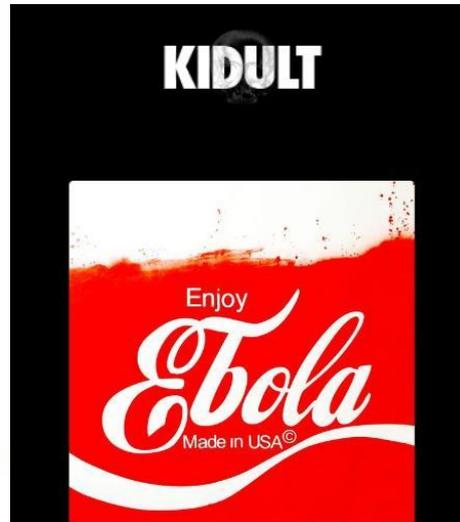
(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 7 (a). Kidult “*Anti Advertising Agency*” (2013, *Screen Printing on T-Shirt*)

Gambar 8 (b). Kidult “*Celebrate The Truth*” (2014, *Instalasi*)

Gambar 9 (c). Kidult “*Extincto*” (2015, *Patung*)

Gambar 10 (d). Kidult “*Enjoy Ebola*” (2016, *Poster*)

(Sumber: www.kidultone.com) 2017

C. Kajian Teori

Kajian teori digunakan untuk mendapatkan teori, baik teori seni maupun teori-teori dasar atau materi dasar sebagai pedoman atau landasan dalam penciptaan karya seni.

Dalam melakukan proses berkarya kreatif perupa memerlukan beberapa landasan teori yang tepat untuk dapat mendukung penciptaan karya tugas akhir secara utuh. Hal ini sangat diperlukan perupa dalam menguatkan ide ataupun gagasan dalam proses berkarya.

Pada bagian ini perupa akan memaparkan beberapa temuan berupa kutipan, kajian serta pengetahuan dari beberapa pakar mengenai bahasan materi lengkap serta

pendukung penulisan makalah Tugas Akhir untuk menjadi lebih baik. Selain itu sebagai referensi dan menambah wawasan dalam proses kreatif berkarya. Berikut teori-teori yang mengacu pada tema perupa yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Seni Rupa Kontemporer

Istilah “kontemporer” berarti a. sewaktu; semasa; pada waktu atau masa yang sama; b. pada masa kini, dewasa ini, misalnya: pameran seni rupa kontemporer (Poerwadarminta, 2002, p. 521). Penggunaan kata “kontemporer” dalam masyarakat termasuk kalangan masyarakat seni rupa kadang masih rancu. Ada yang menggunakan istilah “seni rupa masa kini” atau tanpa suatu batas yang berarti antara “seni rupa modern” dengan “seni rupa kontemporer” Sumartono menjelaskan, ada dua pengertian “seni rupa kontemporer” yang berlaku di Indonesia: 1) pengertian yang beredar secara luas di masyarakat, “seni rupa kontemporer” bisa berarti seni rupa modern dan seni rupa alternatif, seperti: instalasi, *happenings*, dan *performance art*, yang berkembang di masa sekarang.

Instalasi adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan menggabungkan berbagai media, dengan membentuk kesatuan baru, dan menawarkan makna baru. Karya instalasi tampil secara bebas, tidak menghiraukan pengkotakan cabang-cabang seni menjadi seni lukis, seni patung, seni grafis, dan lain-lain. Instalasi bisa saja mengandung kritik, sindiran, atau keprihatinan. 2) Membatasi seni rupa kontemporer hanya saja pada seni rupa alternatif, seperti instalasi, *happenings*, *performance art*, dan karya-karya lain yang menggunakan kecenderungan bertentangan dengan seni rupa modern. Menurut pengertian ini, seni rupa

kontemporer adalah penolakan terhadap seni rupa modern. Perkembangan seni rupa kontemporer mulai sejak tahun 1970-an bersamaan dengan terjadinya krisis seni rupa modern (Sumartono, 2000).

Istilah kontemporer cenderung mengarah untuk seni rupa kontemporer dalam pengertian yang kedua “anti-modernisme”. Seni instalasi, *happenings*, *performance art*, dan karya-karya lain yang mengandung sindiran, kritik, atau keprihatinan sebagai perkembangan seni rupa paling mutakhir. Seni rupa ini dekat kepada masyarakat. Tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menyentuh berbagai aspek kehidupan dengan media dan teknik terbatas.

Kontemporer dalam hal ini identik dengan masa kini, atau istilah kerennya, post-modern Seni rupa post-modern awalnya berkembang di negara maju (post-industri) yang merupakan refleksi dari post-modernitas masyarakatnya. Globalisasi menggelinding sebagai keperluan perluasan pasar bagi negara-negara maju. Peristiwa yang terjadi dinegara maju dengan cepat terjadi dinegara berkembang. Budaya konsumtif mendunia, akibat keberhasilan negara maju dalam memperluas pemasaran produknya. Gaya hidup menjadi hal yang sangat penting. Kekuasaan hegemoni Barat mulai luluh, blok Barat dan Timur mencair, dunia seolah memetakan dirinya dalam berbagai bentuk regional berdasarkan rumpun-rumpun kebudayaannya.



Gambar 11. Heri Dono “*Unidentifying Unflying Object*” (2012, Patung dan Mixed Media)

(Sumber: www.tempo.co) 2018

Dalam seni rupa kontemporer setiap negara memiliki cara pandangnya sendiri-sendiri dalam menghadapi globalisasi berlandaskan etnisitas masing-masing. Karena seni rupa kontemporer bukan gerakan atau aliran, bukan mengejar identitas, tetapi merupakan refleksi masa transisi. Selain membawa titik pencerahan bagi negara-negara berkembang, juga membuka peluang untuk pengembangan emosi, intuisi, fantasi, kontemplasi, mistikisme, dan bahkan majik dalam bahasa rupa kontemporer.

a. Estetika Seni Rupa Kontemporer

Estetika Kontemporer menurut Benedetto Croce adalah segala sesuatu yang indah adalah ideal, yang merupakan aktivitas pikiran. Aktivitas pikiran dibagi menjadi dua yaitu yang teoritis (logika dan estetika), dan yang praktis (ekonomi dan etika). Kata “Kontemporer” yang berasal dari kata “*co*” (bersama) dan “*tempo*” (waktu). Sehingga menegaskan bahwa seni kontemporer adalah karya yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui. Menurut Susanne K. Langer berpendapat bahwa seni sebagai penciptaan bentuk yang menyimbolkan

perasaan manusia. Teori dari Sussane ini disebut sebagai teori simbolis ekspresif. Suatu *symbol* mengekspresikan perasaan manusia, melalui abstraksi. *Symbol* bagi Sussane adalah alat yang memungkinkan kita membuat suatu abstraksi. Setiap seni menyimbolkan dengan caranya sendiri tentang perasaan manusia. Contoh: seni lukis menyimbolkan aneka jenis adegan. Dengan demikian, Sussane menyimpulkan bahwa seni sejati merupakan bentuk ekspresif dan bukan sekedar *symbol* seni (Langer, 1953).

Ciri-ciri seni kontemporer antara lain sebagai berikut:

1. Tiadanya sekat antara berbagai disiplin seni, alias meleburnya batas-batas antara seni lukis, patung, grafik, kriya, teater, musik, anarkis, hingga aksi politik.
2. Konsep penciptaannya tetap berbasis pada sebuah filosofi, tetapi jangkauan penjabaran visualisasinya tidak terbatas.
3. Tidak terikat pada pakem-pakem tertentu dan aturan-aturan zaman dahulu, tetapi berkembang sesuai zaman.
4. Mempunyai gairah dan *moralistic* yang berkaitan dengan matra sosial dan politik sebagai tesis.
5. Seni yang cenderung diminati media massa untuk dijadikan komoditas pewacanaan sebagai aktualitas berita yang *fashionable*.
6. Mengutamakan jenis seni media baru seperti instalasi, performance, fotografi, video, seni serat dan menerima seni kriya dan seni populer.
7. Isu-isu yang diwacanakan seni rupa kontemporer misalnya : jender, HAM, multikultural, budaya etnik, lingkungan hidup, buruh migran, diaspora.

Ada dua aspek mendasar di balik pemahaman tentang seni rupa kontemporer yang berlaku di Indonesia. Aspek pertama mengarah pada pemahaman seni rupa kontemporer sebagai seni rupa alternatif, dengan media ungkap baru seperti instalasi, *performance art*, *video art*, *environmental art*. *Performance art* disebut juga seni rupa pertunjukan, seni rupa peristiwa.

Performance art merupakan penggabungan seni rupa dengan seni pertunjukan persilangan antara pameran seni rupa dengan pertunjukan teatrikal. Dalam hal ini ditampilkan unsur rupa, musik, dan gerak, namun menghindari adanya alur cerita secara tradisional. Seni instalasi merupakan karya rupa yang terdiri atas gabungan berbagai media sehingga membentuk kesatuan baru dan menawarkan makna baru pula. Karya seni instalasi menjadi wujud nyata pembebasan seni rupa dari penggolongan seni lukis, seni grafis, seni patung, seni reklame, dan cabang-cabang seni rupa lainnya, serta penghapusan pandangan orang-orang awam atas seni rupa menjadi seni murni-seni terapan, seni tinggi-seni rendah, atau seni bebas-seni terikat.

Aspek kedua adalah seni rupa kontemporer sebagai seni rupa yang menentang atau menolak seni rupa modern (anti-modernisme). Seni rupa kontemporer sangat menghargai pluralitas, berorientasi secara bebas, tidak menghiraukan batasan secara kaku. Seni rupa kontemporer dapat diciptakan dari berbagai benda, bahan, atau media, tidak ada pembedaan antara satu dengan yang lain, termasuk benda-benda yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari.

Ide-ide kreatif dalam karya seni adalah perwujudan dari kejeniusan seniman sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Perkembangan seni tidak hanya pada tataran keindahan tanpa makna, tetapi lebih jauh pada esensi yang terkandung dalam karya seni yang diciptakan, jadi bukan hanya bentuk fisik yang menampilkan keindahan estetis, namun dibalik karya seni memiliki roh yang mampu memberikan pencerahan yang mempengaruhi perenungan bagi penikmat atau audiensi untuk mencapai kesadaran estetis.

Estetika, dalam perkembangannya tidak lagi menjadi monopoli, milik segelintir satu orang saja dalam masyarakat karena sebagian besar masyarakat mampu memiliki dan menikmati hasil-hasil karya seni. Estetika seni dapat menjadi proses penyadaran bagi masyarakat pada tingkatan kesadaran dalam analisis yaitu kesadaran yang magis (*magical consciousness*) yang tidak mampu melihat keterkaitan kemiskinan dengan sistem politik, kebudayaan dan kesadaran kebudayaan naïf (*naïfal consciousness*) memandang “aspek manusia” yang menjadi akar penyebab masalah masyarakat, timbulnya kemiskinan disebabkan “salah” masyarakat sendiri sehingga kebudayaan dan kesenian tidak mempertanyakan sistem dan struktur karena sudah dianggap baik dan benar merupakan faktor *given*, menuju pada perubahan sosial pada kesadaran kritis.



Gambar 12. Christo and Jeanne-Claude “*Wrapped Reichstag*” (Berlin 1971-95, *Public Art, Environmental Art*)

(Sumber: Wolfgang Volz www.christojeanneclaude.net) 2017

b. Seni Instalasi

Istilah instalasi muncul sebagai pergeseran dari istilah pameran pada pertengahan tahun 1970-an. Kedua istilah tersebut dipakai secara bergantian untuk menjelaskan karya yang dipasang di ruang pameran. Sejak itu, istilah instalasi berkembang untuk menyebut jenis seni tertentu. Seni instalasi mengacu pada karya yang menciptakan suatu kondisi kehadiran bagi penonton untuk memasuki, mengitari, dan secara langsung merasakan objek.

Instalasi bertujuan untuk merubah persepsi ruang yang bersifat sementara ataupun permanen, seni jenis ini biasanya di letakan atau dipajang di galeri atau museum atau bisa juga di tempatkan di ruang publik. Seni instalasi dikenal tahun 1970 an salah satu tokoh yang mempopulerkan adalah Marcel Ducham dan Kurt Schwiter (kopi keliling 2016).

Istilah “instalasi” biasanya diperuntukan pada karya seni yang terdiri atas beberapa bagian dalam satu unit; karya seperti ini biasanya mengandung pesan sosial. Pada tahun 1990-an bentuk seni ini menjadi cara ungkap yang paling disukai. Berbagai perdebatan mengenai kemunculannya dan pandangan dibelakangnya, menjelaskan apa yang dikenal dengan “Seni Tinggi” dan “Seni Rendah”. Seni instalasi bertujuan untuk lebih dekat dengan rakyat, dengan akarnya, dan mengenali problema mereka (Supangkat, 1997).



Gambar 13. FX Harsono “*THE LIFE AND THE CHAOS: OBJECTS, IMAGES AND WORDS*”
(2015, Instalasi dan Mixed Media)
(Sumber: www.indoartnow.com) 2018

c. Apropriasi

Istilah apropriasi (*appropriation*), atau “penyetaraan”, sering terdengar dalam berbagai perbincangan seni rupa, maupun budaya kontemporer. Terutama dalam diskusi yang menyangkut perkembangan budaya seni rupa *pasca-modern* (posmodern). Apropriasi selalu bersanding dengan jargon-jargon yang disuarakan kaum posmodernis, seperti *allegory*, parodi (pelesetan), eklektik atau *bricolage*.

Aropriasi selalu mengandung gejala kemiripan atau keserupaan suatu imaji terhadap imaji lainnya.

Seni rupa dengan kecenderungan apropriasi ternyata sangat lazim dipraktikkan di barat sejak awal abad ke-20. Dalam situs Wikipedia maupun sejarawan Robert S. Nelson (Nelson, 2003, pp. 163-164), di sebutkan bahwa, mengapropriasi sesuatu yang melibatkan upaya “pengambil-alihan”. Dalam seni rupa barat, istilah apropriasi sering merujuk pada penggunaan elemen-elemen pinjaman dalam suatu kreasi karya seni. Peminjaman elemen tersebut termasuk citraan atau gambar, bentukan atau gaya dari sejarah seni atau budaya populer, maupun material serta teknik-teknik dari lingkup bukan seni. Sejak dekade 1980’an istilah ini juga mengacu kepada yang lebih khusus, mengutip karya dari seniman lain untuk menciptakan suatu karya baru. Karya baru tersebut bisa atau tidak merubah imaji karya semula. Seperti contohnya kekaryaannya seniman Amerika Utara 1970’an; Sherry Levine, Barbara Kruger atau Cindy Sherman.



Gambar 14. Shepard Fairey “HOPE” (2008, Poster)
(Sumber: www.indoartnow.com) 2018

Masih dalam situs tersebut, diuraikan aspek-aspek apropriasi muncul dominan di wilayah sejarah seni modern abad 20, jika kita mempertimbangkan dasar pembuatan karya seni sebagai peminjaman citraan atau konsep dari dunia sekeliling, dan penafsirannya kembali ke dalam karya seni. Beberapa ahli bahkan mengklasifikasikan seniman seperti Leonardo Da Vinci sebagai seorang seniman apropriasi, karena ia menggunakan metode yang rumit, meminjam beragam sumber seperti biologi, matematik, teknik mesin dan seni, dan kemudian mensintesanya ke dalam penemuan-penemuan dan penciptaan karya-karya seni.

Oleh karena itu, dalam era- pasca modern ini, seputar isu seni seperti otentisitas, orisinalitas, keluhungan, kemandirian, kejeniusan, kemuliaan gagasan, bukanlah hal yang harus lagi jadi parameter atau menjadi keutamaan nilainya. Tetapi seni rupa menjadi praktek yang terkait dengan kekuasaan simbolik, serta modal, dan juga dipengaruhi oleh sistem yang menunjangnya. Maka risalah mending Walter Benjamin (1892-1940), menjadi begitu penting, dan sangat berpengaruh pada pemikiran praktek seni dan kajian budaya kontemporer. Dalam esainya “Seni Dalam Era Reproduksi Mekanik”, tahun 1936, ia mengemukakan, bahwa kemampuan teknologi reproduksi citraan secara masinal membawa dampak besar, bukan hanya terhadap tradisi metoda penciptaan karya seni, dan nilai-nilai hakiki dalam watak tradisi seni (elemen auratiknya), tetapi juga secara signifikan telah menggeser cara pandang kita terhadap apa yang kita lihat, dan kita pahami.

Konon, pemikiran Benjamin juga dilatari oleh pelbagai peristiwa penting dalam bidang seni lukis di Eropa waktu itu. Selain tentunya fenomena fotografi dan juga film, sebagai agen penting dalam mengonstruksi cara melihat modern. Dalam

catatan sejarah seni rupa Barat dikejutkan oleh kelakuan Marchel Duchamp, yang memamerkan tempat kencing (1917), roda sepeda, dan potret Monalisa berkumis (1919). Pablo Picasso (1912) dan Georges Braque (1913) , sebelumnya menciptakan lukisan kubistik dengan menyertakan kepingan atau bagian benda-benda keseharian di permukaan lukisannya. Alih – alih, bahwa terjadi pergeseran metoda melukis sehubungan dengan cara memandang masyarakat modern. Seolah telah terjadi peleburan antara nilai – nilai luhung dalam sejarah seni, dengan nilai yang hadir dalam keseharian. Disinilah seni apropriasi muncul sebagai suatu bentuk politik representasi, dan gejala ini erat kaitannya secara konstruktif dengan kemunculan mesin cetak di Eropa, kemudian fotografi di tengah abad 19. Juga dengan penyebarannya secara masal, menciptakan – apa yang disebutkan Andre Malroux (sastrawan Perancis)- “museum tanpa dinding”.

2. *Public Art*

Kata *public art* secara umum mendeskripsikan suatu karya seni yang diperuntukkan bagi masyarakat yang dapat diakses oleh publik luas (Miles, 1997, p. 8). Berdasarkan definisi ini, *public art* merupakan seni yang dapat diakses publik yang dengan kata lain, semua orang dapat mengaksesnya dan melihatnya, dimana untuk itulah penempatannya harus mendukung kedua hal tersebut.

Secara umum definisi tersebut kemudian mengalami perkembangan (Hayden, 1997, pp. 67-68) yaitu adalah seni yang dapat diakses oleh publik karena letaknya yang permanen pada tempat publik (tidak berada pada galeri atau museum atau perkantoran privat atau pada rumah, melainkan pada jalan, taman dan ruang publik lainnya). Namun definisi yang lebih baik menurut para seniman adalah *public art*

memiliki konten yang berkaitan dengan publik. Hal ini telah dilakukan dengan adanya *new genre public art* pada tahun 60'an dan 70'an yang menyuarakan pernyataan tertentu dan menyinggung isu yang dialami publik pada saat itu seperti emansipasi wanita. Pada masa ini, standar keindahan yang digunakan telah berbeda, dimana hampir setiap aspek dari seni seperti *gesture*, atau *event* dapat dilihat sebagai obyek seni. Selain itu ditekankan juga hubungan antara seni dengan tempat mereka didirikan, kondisi tempat dan konteks pada lokasi (Perelli, pp. 162-163).

Tapak bukan lagi dilihat sebagai sekedar tempat meletakkan sebuah karya seni, tetapi terdapat keterkaitan dimana tapak dapat menguatkan arti dari seni itu sendiri dan seni tersebut dapat memperkuat identitas dari tempat tersebut. Mary Jane Jacobs menekankan pentingnya penggunaan tapak di luar museum atau galeri, mengindikasikan adanya kesadaran bahwa bagaimana suatu tempat dapat berkontribusi untuk memberi nilai lebih terhadap objek seni itu sendiri, adanya kebebasan untuk berinovasi dan dapat diakses oleh publik luas.



Gambar 15. CSM students “*SongBoard*” (2012, *Multi-sensory interactive wall installation*)

(Sumber: www.frameweb.com) 2018

Pernyataan tersebut didukung oleh Cartiere dan Wills dalam *The Practice of Public art* dengan memberikan beberapa kategori yang harus dipenuhi oleh *public art*, yaitu:

1. Berada pada tempat yang dapat diakses dan terlihat oleh publik.
2. Berhubungan atau mempengaruhi komunitas atau individual (*berhubungan dengan public interest*).
3. *Public art* tersebut diurus untuk atau dipergunakan oleh komunitas umum atau individual (berada pada ruang publik).
4. Dibiayai oleh publik untuk publik (*publicly funded*).

Peletakan *public art* memerlukan sebuah tapak yaitu berupa ruang kota sebagai tempat yang terbentuk secara sosial (Deutsche, 1992, p. 160) . Tempat yang dibutuhkan oleh *public art* yaitu merupakan tempat yang memungkinkan publik untuk mengaksesnya dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial.

Berdasarkan kategori dan pengertian-pengertian di atas, ruang publik merupakan tempat yang sesuai untuk menjadi tapak bagi *public art*, dimana *public art* merupakan seni yang diletakkan pada sebuah tempat agar publik dapat mengaksesnya dan melihatnya. Respon oleh publik luas terhadap *public art* tersebut merupakan aspek yang menentukan keberhasilan *public art* sebagai seni yang berpengaruh bagi publik luas. Dengan demikian, *public art* yang berada pada suatu tempat akan menjadi bagian yang dapat memperkuat karakter dari ruang publik dan menjadi daya tarik bagi orang untuk menuju ruang publik.

a. Jenis-jenis *Public art*

Dengan pengertian *public art* yang cukup luas, terdapat pendapat yang berbeda-beda untuk menentukan kategori *public art* sendiri. *Public art* karenanya juga dapat dikategorikan berdasarkan kondisi *public art* tersebut berada pada tapak serta bentuk dan fungsi *public art* pada tapak.

1. *Public art* berdasarkan kondisi pada tapak (www.visual-arts.cork.com), yaitu:

1) Permanen

Public art dapat memiliki bentuk yang permanen, dengan kata lain berdiri pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak jarang tipe *public art* ini menjadi penanda suatu tempat.

Contoh *public art*:

- 1) *Sculpture* yaitu, segala bentuk tiga dimensi yang dibuat sebagai bentuk dari ekspresi sang seniman. *Sculpture* berhubungan dengan ruang dimana ia diletakkan dan dapat mengisi ruang atau mempengaruhi ruang tersebut. (<http://www.blumoonwebdesign.com/art-glossary-4.asp>)
- 2) *Commemorative sculpture*: bertujuan untuk mengingat peristiwa atau *event* tertentu.
- 3) *Architectural sculpture*: dapat berupa bagian terpisah dari bangunan atau sengaja dibuat sebagai bagian dari struktur bangunan.
- 4) *Traditional sculpture*

- a) Mural: sebuah gambar besar yang dibuat pada dinding bangunan publik.
- b) *Amenities* seperti lampu jalan, bangku dan air mancur.
- c) Instalasi: merupakan seni yang baru dipasang atau diatur pada tapak oleh seniman itu sendiri atau berdasarkan instruksi dari seniman. Dapat bersifat sementara atau permanen.
(<http://www.artlex.com/ArtLex/ij/installation.html>)

2) Temporal

Merupakan jenis *public art* yang ditampilkan pada tapak dalam jangka waktu sementara.

Contoh *public art*:

- 1) Instalasi (peletakan sementara).
 - 2) Pameran terbuka untuk publik seperti pameran lukisan atau foto.
 - 3) Pertunjukkan terbuka untuk publik seperti performance art
2. Berdasarkan bentuk dan fungsinya terhadap ruang publik yang ditempatinya, *public art* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu *historical*, *aesthetic* dan *functional form* bentuk (Charmicael,1998, par.2):
- a) *Historical form* bentuk *public art* yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau figur seseorang yang penting dan untuk menghubungkan antara masyarakat dengan sejarah tempat tersebut. Bentuk *public art* ini diciptakan untuk memancing kembali memori dari masyarakat sebagai pengamat. Contoh dari *public art* ini adalah memorial,

commemorative sculpture berupa patung yang bertujuan untuk mengingat suatu peristiwa tertentu.

- b) *Aesthetic form* merupakan bentuk *public art* yang merespon terhadap adanya kebutuhan untuk memperindah suatu tempat, dalam hal ini adalah ruang publik. Bentuk ini merupakan bagian dari tempat mereka didirikan. Contoh dari *public art* ini adalah instalasi, air mancur.
- c) *Functional form* merupakan bentuk *public art* yang diintegrasikan pada obyek yang fungsional seperti halte bus, bangku, lampu jalan (Ahsen Özsoy; Bahar Bayram, 2007, p.7). Seperti halnya *Aesthetic form*, bentuk ini merupakan elemen dari tempat *public art* tersebut yang didirikan dengan perbedaan, dimana jenis *public art* ini lebih menyatu terhadap elemen-elemen fisik ruang publik.

b. *Space dan Place*

Goodall; Mayhew & Penny (1987; 1992) menyebutkan *space* sebagai terbuka, dan abstrak. *Place* atau tempat merupakan bagian dari *space* yang telah ditempati oleh seseorang atau sesuatu dan diberikan arti atau nilai tertentu. Clark (1985) menyebutkan bahwa interaksi antar orang dengan lingkungan dekat inilah yang memberi karakteristik yang berbeda dari area sekitarnya (Madanipour, 1996, p. 23). Jika *space* mengizinkan adanya pergerakan maka *place* memberikan jeda (*pause*). Gagasan bahwa *place* sebagai suatu ruang tertentu yang melingkungi dengan identitas dan arti tetap, dalam kenyataannya telah menghadapi tantangan karena dianggap kurang dinamis. *Place* ditentukan bukan hanya dari elemen dan kualitas fisik seperti bentuk dan ukuran ruang tetapi melalui hubungan sosial dengan

beragamnya interaksi, menjadikan identitas dari *place* adalah “tidak tetap atau dapat berubah-ubah, dan beragam”. Karenanya identitas dari *place* bukannya tetap, tetapi identitas *place* akan ditetapkan berulang kali seiring dengan dinamika hubungan sosial sejalan dengan pergantian waktu. Sebagai ilustrasi, pergantian identitas yang lebih lambat menggambarkan hubungan antara manusia yang lebih stabil.

a.1. Aktivitas pada ruang publik

Ruang publik dapat diakses oleh publik luas dan memberi kemungkinan terjadinya pertemuan dan interaksi sosial secara singkat dan tidak intim, sehingga ruang publik dapat mendukung terjadinya berbagai macam aktivitas di dalamnya.

Madanipour dalam *Design of Urban Space* mengatakan bahwa definisi ruang publik menekankan pada akses terbuka dimana aktivitas yang berbeda-beda terutama interaksi sosial yang terjadi, berada karena akses yang terbuka pada ruang publik tersebut. Definisi yang diutarakan oleh Carr (1992), menyatakan dimana ruang publik merupakan suatu tempat dimana orang melakukan aktivitas rutin dan fungsional yang mengikat komunitas, baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam perayaan tertentu (Stephen Carr, 1992, p. xi).

Ruang publik dapat dikatakan sukses apabila terjadi aktivitas yang beragam, Aktivitas tersebut merupakan penentu bagi hidup atau tidaknya sebuah ruang publik.

Jahn gehl dalam *Life Between Buildings* (Gehl, 1987, pp. 11-14) membagi aktivitas pada ruang publik menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Aktivitas Wajib (necessary activities)

Aktivitas wajib merupakan kegiatan yang orang biasa lakukan sehari –hari yang sudah merupakan keharusan atau kewajiban bagi mereka. Kegiatan ini penting dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan kegiatan yang dilakukan bagi kelangsungan hidup. Contoh dari aktivitas wajib adalah bekerja atau sekolah, kegiatan rumah tangga dan lainnya. Pentingnya kegiatan ini bagi keseharian membuat kegiatan ini dilakukan sepanjang waktu dalam kondisi apapun tidak peduli dengan kualitas lingkungan tempat mereka melakukan aktivitas.

2) Aktivitas Tambahan (optional/recreational activities)

Aktivitas tambahan dilakukan jika pelaku memiliki keinginan serta memiliki waktu dan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh aktivitas yang merupakan aktivitas tambahan adalah jalan-jalan santai menikmati udara segar, berjemur, duduk atau berdiri dengan rileks. Aktivitas ini sangat tergantung oleh kondisi lingkungan karena aktivitas ini hanya terjadi apabila kondisi eksterior mendukung, seperti cuaca dan tempat. Eksterior juga menjadi penting karena aktivitas tambahan ini banyak ditemukan di ruang luar. Apabila kualitas ruang luar tidak mendukung, maka hanya aktivitas wajib yang terjadi sedangkan apabila kualitas ruang luar baik, kemungkinan terjadinya aktivitas yang lebih beragam menjadi lebih besar.

Aktivitas tambahan ini memiliki pengaruh terhadap aktivitas dimana aktivitas wajib yang terjadi dapat memakan waktu yang lebih lama karena orang akan lebih rileks, dan tidak terburu-buru ingin pulang. Dengan situasi dan

tempat yang mendukung, orang merasa terundang untuk duduk, makan dan sebagainya yang mengakibatkan tempat tersebut menarik orang dan mendukung terjadinya aktivitas yang beragam.

3) Aktivitas Sosial (*social activities*)

Aktivitas sosial merupakan aktivitas yang tergantung dari kehadiran orang lain dalam ruang publik dan merupakan bentuk kontak sosial. Contohnya secara aktif adalah anak bermain, dan pertemuan serta perbincangan dalam kegiatan komunal (dua orang atau lebih). Aktivitas dapat bersifat pasif, seperti melihat dan mendengar orang lain. Aktivitas ini juga dapat disebut *resultant activities* karena pada hampir setiap kejadian, pelaku/orang yang melakukan aktivitas tersebut berada pada ruang yang sama, dan berlangsung secara spontan, dan umumnya berlangsung sebentar dan tidak intim.

Aktivitas sosial yang lebih menyeluruh dari kontak sosial seperti diskusi, pertemuan, bincang-bincang dan bermain biasanya terjadi pada *communal space* yaitu merupakan ruang yang terbagi oleh kelompok spesifik yang menggunakan area dekat bangunan dengan peruntukan khusus (Clare Cooper Marcus, 1997, p. 4). Contoh dari *communal space* adalah jalan lingkungan tempat tinggal, ruang publik dekat sekolah atau tempat kerja, dimana orang-orang yang berada di sana memiliki jumlah yang terbatas dan umumnya memiliki minat atau latar belakang yang mirip.

Aktivitas sosial turut dipengaruhi oleh kualitas ruang luar, meskipun pengaruh yang ada tidak signifikan seperti pada aktivitas tambahan. Namun karena aktivitas tambahan dan aktivitas sosial terjadi secara bersamaan, maka

apabila kualitas lingkungan baik, maka aktivitas tambahan frekuensinya dapat meningkat dan sebagai akibatnya aktivitas sosial juga meningkat.

Aktivitas sosial sering terjadi bersamaan dengan aktivitas pilihan dan aktivitas wajib karena kedua aktivitas tersebut yang sering memacu terjadinya aktivitas sosial. Karena aktivitas sosial jarang terjadi tanpa bersamaan dengan jenis aktivitas lainnya, maka kualitas ruang luar seperti cahaya, air, tanaman dan lainnya turut mempengaruhi keberlangsungan dari aktivitas sosial tersebut.

Ruang publik dapat dimengertikan bukan hanya sekedar ruang kosong yang dapat dipakai publik, melainkan terbentuk secara aktif, yaitu ruang tersebut melibatkan dan dibentuk oleh orang di dalamnya. Ruang publik dengan segala keterbukaannya tidak hanya dibentuk melalui fisik melainkan terdefinisi juga melalui suatu produksi yaitu hasil dari aktivitas rutin dan interaksi dan hubungan sosial orang-orang yang berada di dalamnya. Hal-hal tersebut yang akhirnya membentuk ruang publik dengan fungsi dan tipe yang berbeda karena ruang publik sesuai dengan kebutuhan dari orang yang menggunakannya. Ruang publik dirasakan oleh pemakainya sebagai bagian dari keseharian dan mencerminkan kehidupan publik.

c. Ruang publik

Menurut Madanipour (Madanipour, 2003, p. 112) secara umum pengertian ruang publik adalah sebuah ruang yang dapat disebut untuk publik apabila diatur oleh otoritas negara, berkaitan dengan publik secara keseluruhan, dan terbuka atau tersedia untuk mereka, serta dapat digunakan dan dibagi oleh semua anggota komunitas. Kata publik berarti menunjuk pada sejumlah besar orang, yang

terkonsep sebagai masyarakat atau sebagai negara dan hal yang diasosiasikan dengan mereka (Madanipour, 2003, p. 109). Pengertian ruang publik dapat dinyatakan sebagai sebuah ruang yang dilihat, diakses dan digunakan oleh setiap orang, dari berbagai umur dan kalangan, dan ruang tersebut dimiliki dan diatur oleh negara untuk kepentingan publik.



Gambar 16. Ruang Publik
(Sumber: www.sindonews.com) 2018

Carmona (Public Spaces: Urban Spaces, 2003, p. 111) membagi ruang publik menjadi 3 (tiga) berdasarkan aksesibilitas oleh publik pada ruang tersebut, antara lain:

1) Ruang publik eksternal

Adalah sebidang lahan yang berada di antara bangunan. Contohnya adalah taman, alun-alun, lapangan atau plaza, jalan dan semacamnya. Ruang publik jenis ini dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang.

2) Ruang publik internal

Adalah ruang publik yang merupakan bangunan umum. Jenis ruang publik ini juga dapat diakses semua orang dengan perbedaan yaitu berada pada tempat tertutup seperti museum, perpustakaan, dan pelbagai fasilitas transportasi untuk publik seperti stasiun dan bandara.

3) Setengah ruang publik

Merupakan ruang publik yang mengalami privatisasi dimana pemilik dan pengurus ruang publik dapat membatasi akses dan kelakuan orang di dalamnya. Jenis ruang publik ini karenanya tidak dapat dikatakan benar-benar merupakan ruang publik. Contoh dari jenis ruang publik ini adalah kampus, restoran, *mall*, dan sebagainya.

Terdapat 4 (empat) kualitas utama dalam menentukan keberhasilan ruang publik (www.pps.org), yaitu:

4) Access and Linkages

Ruang publik memperhatikan kemudahan dan keamanan dalam mencapai tujuan dengan transportasi yang ada. Ruang publik memiliki akses yang mudah terlihat baik dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Akses masuk diharuskan tidak menyesatkan orang, yaitu langsung menuju ke tempat yang mereka inginkan. Hal ini bertujuan agar orang yang datang ke ruang publik mengetahui ke mana mereka dapat masuk dan dapat keluar. Linkages yaitu bagaimana ruang publik tersebut terhubung dengan sekitarnya.

5) Comfort and Image

Citra dari ruang publik adalah bagaimana ruang publik tersebut mempresentasikan dirinya. Pembentukan citra tersebut dapat dibentuk melalui kesan yang ditimbulkan oleh penampilan, kondisi fisik ruang publik, dan suasana yang diciptakan ruang publik serta melalui respon pengguna saat menggunakan ruang publik. Kesan dan kenyamanan yang baik dapat membuat orang akan berdatangan dan menggunakan ruang publik berkali-kali. Kenyamanan berpengaruh orang yang datang pada ruang publik untuk tinggal dan melakukan aktivitas pada ruang publik tersebut (Darmawan, 2009) sehingga orang dapat melakukan aktivitas lebih lama. Hal tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan kebersihan, keamanan, kesejukan dan yang paling penting adalah ketersediaan tempat untuk duduk.

6) Uses and Activities

Orang akan mendatangi ruang publik apabila terdapat sesuatu yang dapat mereka lakukan di sana, atau dengan kata lain ruang publik dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Aktivitas ini memungkinkan orang lain dapat berpartisipasi dan akan semakin baik apabila terdapat aktivitas yang dapat dilakukan berkelompok dibandingkan sendirian. Ruang publik sedapat mungkin dapat digunakan oleh setiap orang, tanpa memandang umur atau kedudukan.

7) Sociability

Ruang publik berperan sebagai tempat dimana terjadi perjumpaan dan aktivitas (bersifat sosial) di antara pengguna ruang publik pada jenis kualitas

ini, dimana ruang publik menjadi tempat yang digunakan untuk berkumpul secara regular bagi pengguna. Para pengguna ruang publik merasakan adanya keterikatan dengan tempat dan pengguna lainnya.

Ruang publik yang terjadi berbagai aktivitas didalamnya merupakan *third place* seperti yang diutarakan oleh Ray Oldenburg dalam *The Great Good Places* (Oldenburg, 1989, p. 16) dimana pengertian *third place* adalah merupakan tempat berkumpul informal di antara rumah (*first place*) dan tempat kerja (*second place*). Agar suatu tempat dapat berfungsi sebagai *third place* maka tempat tersebut harus memiliki beberapa karakteristik yaitu:

8) Neutral Ground

Merupakan tempat dimana orang dapat keluar masuk secara bebas dan dapat diakses setiap orang. Biasanya tempat publik ini dalam sifatnya tidak dapat tergantikan secara privat.

9) Third place as leveler

Dimana setiap orang dapat menggunakan tempat tersebut tanpa dibatasi oleh kelas, dan status sosial. *Third place* merupakan tempat yang inklusif (Oldenburg, 1989, p. 24), yang berarti menyertakan setiap orang untuk menggunakan tempat tersebut, sehingga orang dapat bebas berinteraksi di dalamnya.

10) Conversation is main activity

Suatu tempat dapat dikatakan sebagai *third place* apabila didalamnya terjadi aktivitas sosial berupa pembicaraan. Di sini setiap orang dianggap kedudukannya sama dan mereka dapat berbincang sesuka mereka.

11) Accessibility and Accommodation

Third place cukup dekat atau memberi kemungkinan untuk dapat dikunjungi secara berkala dan tempat tersebut dapat digunakan secara gratis dan tidak membutuhkan banyak biaya.

12) The Regulars

Regular yaitu seseorang atau kelompok yang menggunakan suatu tempat secara sering sehingga dipastikan bila seseorang datang ke tempat tersebut dipastikan dapat menemui orang-orang lain dalam kelompok tersebut.

13) A Low Profile

Daya tarik dari *third place* adalah tidak hanya bagaimana suatu tempat mengutamakan penampilannya saja untuk menarik orang untuk datang ke sana tetapi aktivitas dan perbincangan yang terjadi menjadi daya tarik tempat tersebut.

d. Kriteria peran *public art* pada ruang publik

Dengan *public art* sebagai seni yang ditempatkan pada tempat dimana publik luas dapat mengaksesnya maka respon yang dihasilkan dapat beragam. Berbeda dengan seni yang berada pada museum dan galeri, *Public art* dalam perkembangannya mengandalkan respon dari publik yaitu berupa masyarakat umum yang kebanyakan awam akan pengetahuan seni dan menganggap seni sebagai sesuatu yang bukan menjadi bagian keseharian dari mereka dan hanya milik kalangan tertentu.

Untuk itu kriteria yang digunakan untuk menilai seni pada ruang publik berbeda dengan seni yang berada di galeri dan museum. Crowhurst-Lennard dan Lennard

dalam *Livable Cities* (Liveable cities-People and Places: Social Design Principles for the Future of the City, 1987, p. 90) membedakan kedua hal tersebut dengan berpendapat jika suatu seni dapat memiliki bentuk yang dapat memenuhi rasa keindahan sang seniman serta merupakan ekspresi personal dari sang seniman, dapat merupakan koleksi pribadi atau merupakan koleksi yang dibuka untuk publik. Seni yang berada pada museum atau galeri tidak harus berpengaruh pada setiap orang, tetapi berpengaruh terhadap orang-orang tertentu saja yang seringkali memang mengerti seni. *Public art* bisa saja memenuhi kriteria diatas, tetapi sebagai suatu seni dalam ruang publik harus secara mendalam berpengaruh terhadap pengguna ruang publik yaitu masyarakat luas dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan seni.

Berikut ini beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana seni dalam ruang publik berperan (Crowhurst-Lennard dan Lennard, 1987, p.48-50).

- a. Berperan dalam membawa dampak positif dalam kehidupan kota dengan membentuk identitas dan bermanfaat bagi kehidupan publik yaitu: memberikan keindahan, kesenangan, dan mendukung aktivitas sosial.
- b. Membuat objek seni yang memiliki bentuk yang dapat dimanipulasi, diduduki, dan lainnya sehingga orang tertarik untuk berinteraksi terhadap objek seni tersebut atau obyek seni tersebut memiliki cerita tertentu dibaliknya seperti sejarah, metafora, atau mitologi sehingga membuat orang tertarik.
- c. Mendorong terjadinya kontak dan komunikasi. Patung atau air mancur yang diletakkan pada tempat yang terlihat dan mudah diakses orang sehingga

obyek seni tersebut dapat membuat orang berhenti melihat dan duduk serta membuka pembicaraan di sekitar patung atau air mancur.

- d. Menyediakan kenyamanan dan amenities pada *public art* yang menyatu dengan objek seni itu sendiri. Sebagai gambaran, tekstur pada patung atau suara pada air mancur dapat memberi pengalaman terhadap panca indera dan dapat menenangkan, serta anak tangga, dan pinggiran sebagai bentuk dari *public art* yang dapat digunakan untuk duduk atau bersandar oleh orang.

e. **Keterlibatan dalam ruang publik**

Aktivitas sosial selain dipicu oleh aktivitas lain memerlukan suatu pemicu agar orang yang berada pada ruang publik dapat menginisiasi terjadinya interaksi terhadap elemen-elemen dalam ruang publik itu sendiri. Hal itulah yang disebut dengan keterlibatan. Carr *et al* (1992, p.87-136) dalam ruang publik menjelaskan dua jenis keterlibatan, yaitu *Passive engagement* (keterlibatan pasif) dan *Active engagement* (keterlibatan aktif).

1) **Keterlibatan secara pasif (*passive engagement*)**

Dalam keterlibatan pasif, orang tidak terlibat langsung di dalam lingkungannya. Mereka memilih untuk menjadi penonton dan mendapat kepuasan dengan hanya melihat dan mendengar. Kegiatan yang termasuk dalam keterlibatan pasif antara lain adalah mengamati pedestrian, melihat *public art*, dan menonton performance. Mengamati dan menonton orang merupakan aktivitas yang sering terjadi pada ruang publik yang kecil. Whyte (1980) menyimpulkan bahwa hal yang paling menarik orang untuk datang ke ruang publik adalah keberadaan orang lain. Hal lain

yang membuat orang tertarik terhadap ruang publik adalah elemen fisik dari ruang publik, seperti air mancur yang sering menjadi *point of interest*.

2) Keterlibatan Aktif (*active engagement*)

Keterlibatan aktif merepresentasikan *experience* yang lebih langsung dengan tempat dan orang yang berada di dalamnya (Matthew Carmona & S., 2007, p. 234). Ada orang yang puas dengan mengamati orang lain namun ada yang menginginkan kontak langsung dengan orang lain baik mereka orang asing atau orang yang telah mereka kenal. Whyte menyebutkan suatu fitur atau kejadian khusus, seperti *entertainer* atau patung yang menghasilkan fenomena *triangulation* yaitu suatu hal yang khusus dapat menimbulkan ikatan antar orang dan memancing orang asing untuk berbicara satu sama lain.

Active engagement memiliki fungsi sosial yang didapat melalui interaksi sosial, seperti pertemuan, anak-anak bermain, rekreasi, aktivitas olahraga dan semua yang memanfaatkan kegunaan dari badan manusia.

Kontak dengan elemen fisik pada *setting* merupakan bentuk lain dari *active engagement*. Kontak yang dimaksud adalah kontak fisik secara langsung dibandingkan hanya berada atau bergerak pada tempat tersebut. Salah satu contoh adalah menyentuh dan memercikkan air atau bermain-main di air mancur. Aspek lain dari keterlibatan fisik adalah manipulasi dari elemen-elemen yang ada pada patung. Goldstein (1975) menyebutkan beberapa *public art* yang mendukung aktivitas tersebut seperti *Calder sculpture* di Chicago Plaza. (Matthew Carmona T. H., 2003, p. 236) menyebut pada beberapa kasus, dimana pemakai ruang publik

mengubah elemen-elemen *fixed* sebagai tanda protes kurang responsifnya ruang publik.

3. Estetika Relasional (*relational aesthetic*)

Istilah "*Relational Aesthetic*" diciptakan pada tahun 1996 oleh ahli teori dari Prancis yang sekaligus seorang perupa dan kurator bernama Nicolas Bourriaud. Estetika relasional adalah teori estetika di mana karya seni dinilai berdasarkan hubungan antar manusia yang mereka wakili, produksi, atau dorong (Bourriaud, 1998, p. 112).

Menurut Bourriaud, seni relasional mencakup "seperangkat praktik artistik yang membawa titik teoretis dan praktis untuk melepaskan seluruh hubungan manusia dan konteks sosial mereka, dan bukan ruang mandiri dan pribadi." (Bourriaud, 1998, p. 113) Seorang seniman relasional Mungkin, misalnya, mengubah ruang galeri menjadi tempat sementara untuk menyajikan kopi, dengan penambahan musik latar, pencahayaan yang sesuai, buku untuk dibaca, dan kursi yang nyaman. Karya seni terdiri dari menciptakan lingkungan sosial di mana orang berkumpul untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Bourriaud mengklaim "peran karya seni tidak lagi membentuk realitas imajiner dan utopis, namun sebenarnya adalah cara hidup dan model tindakan dalam skala nyata, skala apa pun yang dipilih oleh seniman." (Bourriaud, 1998, p. 13). Dalam seni relasional, penonton ditonton sebagai sebuah komunitas. Alih-alih karya seni menjadi pertemuan antara penampil dan objek, seni relasional menghasilkan pertemuan antar subyektif. Melalui pertemuan ini, makna diuraikan secara kolektif (Bourriaud,

1998, p. 17). Bourriaud percaya pertemuan kolektif ini dapat bersifat demokratis dan microtopian.



Gambar 17. Lee Mingwei “*The Dining Project*” (1997/2014, *Relation*)
(Sumber: www.momus.ca) 2018

Dalam *Relational Art*, artis tidak lagi berada di pusat. Mereka bukan lagi pencipta jiwa, master atau bahkan selebriti. Seniman itu sendiri lah yang menjadi katalisnya. Mereka memulai sebuah pertanyaan, menekankan pertimbangan, atau menyoroti momen sehari-hari. Dan kemudian, mereka menunggu. Mereka menunggu tanggapan dari orang asing acak, orang yang lewat, target biasa anda dan saya.

Relational Art "Fitur utamanya adalah mempertimbangkan objek estetika antar manusia dalam dirinya sendiri."-Burriaud.

"Relasional Estetika adalah cara untuk mempertimbangkan produktifitas penonton, ruang partisipasi yang ditawarkan oleh seni." -Burriaud.

"Estetika Relasional mengacu pada karya seni yang terbuka, interaktif dan tahan terhadap penutupan. Seni Relasional berlangsung dalam ruang dan waktu yang menciptakan pengalaman komunikatif interaktif dan pertemuan inter subjektif di mana makna diuraikan secara kolektif." -Legier Biederman.

"Seni Kontemporer adalah zona penyangga waktu dimana interaksi (keterlibatan relasional) dapat terjadi, dan interaksi antara manusia dan seni (manusia dan manusia, seni dan manusia) menjadi bentuk 'waktu terbatas' yang terbatas, masih bisa dikomodifikasi namun dengan cara yang sangat berbeda. Ini berarti memperkuat pemahaman Bourriaud mengenai relasional dalam seni - bahwa seni kontemporer berfungsi untuk melihat hal-hal tidak hanya dengan cara yang berbeda, namun melalui keseluruhan kategori baru, bentuk paradigma baru bergeser dengan pemahaman seni modern." -Robin Campbell.

Seniman Seni Relasional menyajikan karya seni seperti berikut:

- a. Momen-momen kehidupan sosial
- b. Benda-benda yang menimbulkan interaksi sosial

a. *Triangulation*

Triangulation merupakan stimulus eksternal yang membuat hubungan di antara orang-orang dan mendorong orang-orang yang saling tidak kenal untuk berbicara antar satu sama lain seolah mereka saling kenal. Stimulus tersebut dapat berupa benda atau orang, dan menjadi pembuka pembicaraan dan orang-orang akan berkomentar, serta memancing orang untuk melakukan pembicaraan. *Triangulation* dapat berfungsi sebagai *social catalyst*, untuk menginisiasi keterlibatan mutual antar orang untuk melakukan perbincangan dan pada ruang publik dimana tidak biasanya orang menginisiasi pembicaraan.

Objek atau *event* yang ada menjadi *social catalyst* bagi orang yang berada pada ruang publik. Objek tersebut akan menjadi fokus perhatian dari orang-orang yang berada pada ruang publik dan mendorong terjadinya interaksi kepada objek tersebut maupun orang yang berada pada sekitar objek. Misalnya ada dua orang berada pada suatu tempat, mereka saling tidak kenal. Kemudian tiba-tiba saja muncul orang lain melakukan suatu atraksi. Atraksi ini dirasa menarik sehingga dapat membuat kedua orang tadi saling bertukar komentar dengan nada seolah mereka saling kenal. Biasanya interaksi ini ditemukan pada penonton yang menyaksikan sebuah pertunjukan, dapat berupa musik dan *entertainers*.

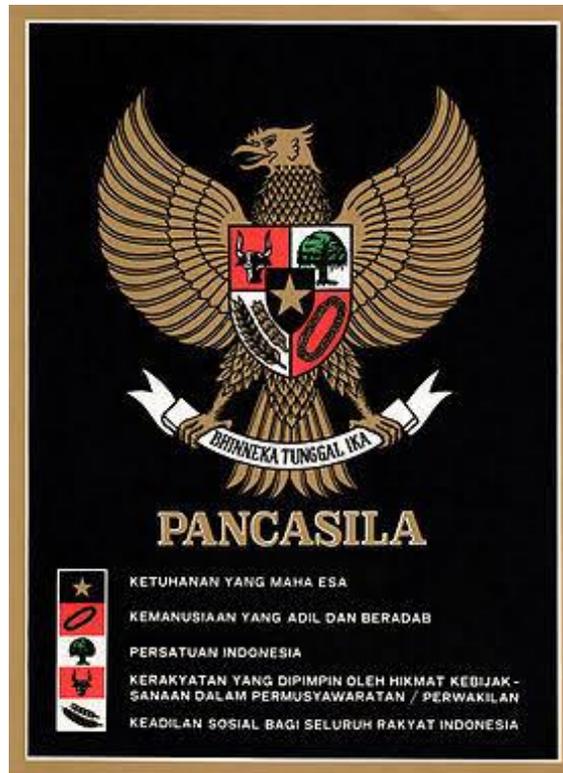


Gambar 18. Candy Chang “*Before I Die*” (2011, instalasi partisipasi)
(Sumber: www.candychang.com) 2018

Patung, salah satunya dapat menciptakan efek sosial yang kuat (Whyte, 1980, p. 97). Interaksi yang dilakukan tidak hanya berupa orang-orang mengomentari sebuah objek atau pertunjukan, William H Whyte memberikan sebuah contoh mengenai instalasi Dubuffet “*Four Trees*” pada Chase Manhattan Plaza yang menarik perhatian orang. Interaksi yang mereka lakukan adalah menyentuh dan berbicara tentang patung tersebut, berkumpul dekat patung tersebut, duduk dan berdiri di bawahnya. Faktor yang dilihat dari keberhasilan patung ini dalam memancing respon publik adalah bagaimana patung tersebut dapat mendorong terjadinya aktivitas sosial di sekitarnya atau pada patung tersebut.

4. #PancasilaSelamanya dalam Karya Seni Publik

a. Pancasila



Gambar 19. Pancasila

(Sumber : www.wikipedia.com) 2018

1) Pengertian Pancasila secara Etimologis

Pengertian Pancasila secara etimologis berarti memaknai Pancasila berdasarkan asal usul kata Pancasila. Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu :

“panca” artinya “lima”

“syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”

“syiila” vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh” (Kaelan, 2010, p. 21).

Kata-kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan diartikan “susila” yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut secara etimologis diartikan sebagai “Panca Syila” yang memiliki makna berbatu sendi lima atau secara harafiah berarti “dasar yang memiliki lima unsur”. Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar/landasan hidup yang berjumlah lima unsur atau memiliki lima unsur.

2) Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan pancasila dimulai pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh dr Radjiman Widyodiningrat. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama dibahas mengenai masalah rumusan dasar negara yang akan dibentuk. Pada sidang BPUPKI ini ada tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara yaitu Mohammad Yamin, Ir. Soekarno, dan Dr. Soepomo.

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato mengenai calon rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pancasila memiliki arti lima dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang dasar 1945 termasuk Pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 termuat lima prinsip dasar yang dijadikan dasar negara yang kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Sejak saat itu Pancasila menjadi istilah umum walaupun dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan istilah “Pancasila”, namun dasar negara Indonesia dikenal dengan istilah Pancasila.

3) Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia membutuhkan seperangkat alat-alat perlengkapan sebagai negara seperti negara-negara lain yang merdeka. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tercantum rumusan Pancasila yaitu :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2010, p. 26).

b. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sejak awal kemerdekaan kedudukan Pancasila yang paling utama yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat

ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam dokumen-dokumen tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak dan normatif. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Bambang Suteng Sulasmono (Sulasmono, 2015, p. 68) adalah sebagai berikut:

1) Dasar berdiri dan tegaknya negara

Pancasila merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar pembentukan negara Indonesia merdeka. Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila harus dijadikan dasar dalam setiap kegiatan bernegara.

2) Dasar kegiatan penyelenggaraan negara

Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Para penyelenggara negara dituntut untuk memimpin pencapaian tujuan itu. Agar penyelenggaraan negara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional, penyelenggara negara harus mendasarkan semua kegiatan

pemerintahan negara kepada Pancasila. Setiap kegiatan penyelenggara negara harus didasarkan dan mempertimbangkan Pancasila sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan negara.

3) Dasar partisipasi warga negara

Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya itu seluruh warga negara harus berpedoman kepada dasar negara Pancasila. Warga negara harus dapat mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam partisipasi upaya mencapai tujuan bangsa Indonesia.

4) Dasar Pergaulan antar warga negara

Pancasila tidak hanya menjadi dasar perhubung antara warga negara dengan negara, melainkan juga dasar perhubungan antar warga negara. Dalam pergaulan sehari-hari tentunya setiap warga negara akan berhubungan dengan warga negara lainnya, dalam hal ini Pancasila dapat dijadikan landasan dasar dalam bergaul dengan warga negara lain.

5) Dasar dan sumber hukum nasional

Seluruh aktivitas penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada Pancasila. Peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

6) Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai, cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/ pandangan hidup.

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka.

Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas bangsa Indonesia sendiri. Dalam era globalisasi menjaga identitas bangsa sangat penting untuk dapat menjaga keutuhan bangsa dan dapat menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain.

Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan bernegara. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional maka dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap pancasila sesuai perkembangan zaman.

c. Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Pancasila

1) Makna Sila Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Dalam sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu sama yang lainnya tetapi nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai sila Pancasila tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai pada sila Pancasila yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

a) Sila Ketuhanan Yang maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila lainnya. Negara didirikan sebagai penjawantahan tujuan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rukiyati, dkk (2013, p. 58) arti dan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan pencipta seluruh apa yang ada di alam semesta.

2. Menjamin penduduk untuk dapat memeluk suatu agama dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
3. Warga negara wajib mempunyai agama dan tidak diperbolehkan atheis.
4. Menjamin tumbuh dan berkembangnya agama dan saling toleransi antar umat beragama.
5. Negara menjadi fasilitator tumbuh dan berkembangnya agama serta menjadi moderator jika terjadi konflik antar agama.

Manusia ada di dunia ini diciptakan oleh sang pencipta yaitu Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan terhadap Tuhan sejak dahulu dengan berkembangnya ajaran animisme, dinamisme dan paham politeisme. Masa selanjutnya, masuklah agama-agama Hindu, Budha, Islam, dan Nasrani ke Indonesia. Dalam bernegara berdasarkan Pancasila, maka negara menjamin hak-hak warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan yang dianutnya. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin setiap warga negara untuk dapat memeluk agama sesuai yang diinginkannya dan dapat menjalankan peribadatan agamanya dengan baik.

b) Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku manusia sesuai nilai-nilai moral dengan memperlakukan sesuatu dengan semestinya. Dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terkandung nilai-nilai bahwa negara harus dapat menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dapat mewujudkan tujuan tercapainya harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hal yang paling dasar yang harus dijamin dalam pemerintahan di Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan perwujudan manusia yang bermoral, berbudaya dan beragama.

Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh sifat adil karena hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya harus mempunyai sifat adil. Dalam hukum di Indonesia manusia mempunyai kedudukan yang sama serta mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Manusia harus bersikap adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, masyarakat bangsa dan negara, lingkungan serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Darmdiharjo (1996) dalam Kaelan (Kaelan, 2010, p. 81) bahwa konsekuensi nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, agama, ras keturunan, dan status sosial. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

c) Sila Persatuan Indonesia

Makna persatuan artinya menjadi satu dan tidak terpecah atau terpisah-pisah. Makna Persatuan Indonesia sering dikaitkan dengan rasa Nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta tanah air dan adanya perasaan bersatu

sebagai suatu bangsa atau negara. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rukiyati dkk (2013, p. 61) menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia adalah nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit serta menumbuhkan rasa senasib dan sepejuangan.

Berdasarkan pelbagai keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai yang dapat menjadikan Indonesia bersatu, tidak terpecah belah dan menumbuhkan sikap rasa nasionalisme serta kebersamaan sebagai suatu bangsa. Persatuan Indonesia menghendaki warga masyarakat bersatu padu demi mencapai tujuan bersama sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.

d) Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai filosofis yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah bahwa hakikat negara adalah perwujudan dari sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Rakyat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Rakyat adalah kekuatan terbesar negara. Negara adalah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terkandung nilai

demokrasi. Demokrasi dalam negara harus dijamin secara bebas namun demokrasi juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab oleh warga negara.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga mengandung pokok pikiran tentang permusyawaratan yang artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat yang dilakukan dengan pengambilan keputusan secara bersama. Dalam menjalankan keputusan bersama harus disertai dengan rasa kejujuran dan tanggung jawab bersama.

Dapat disimpulkan dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai demokrasi yang bertanggung jawab bagi warga negara, penjaminan hak warga negara untuk berpendapat dimuka umum, dan pengambilan suatu keputusan secara bulat dan bijaksana serta dilaksanakan dengan penuh rasa kejujuran dan tanggung jawab.

e) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan artinya adalah memberikan sesuatu hal kepada seseorang sesuai dengan haknya. Dalam sila kelima nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut harus dijiwai oleh hakikat keadilan yaitu adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Rukiyati dkk (2013, p. 63) menyatakan pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila kelima ini adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat, seluruh kekayaan alam dan sebagainya

dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing, serta melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya.

Kaelan (Kaelan, 2010, p. 83) disebutkan bahwa konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan pada hak dan kewajiban. Keadilan legal adalah yaitu suatu keadilan hubungan antara warga negara dengan negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial atau kehidupan bersama warga negara. Negara juga harus memberikan keadilan kepada setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nilai-nilai keadilan juga harus dapat dijadikan dasar oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mensejahterakan seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, dan juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

2) Implementasi Nilai Nilai Pancasila

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2012, p. 70).

Menurut Muhammad Joko Susilo (Susilo, 2008, p. 174) Implementasi

merupakan penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Berdasarkan definisi implementasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Pancasila sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan agar cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dapat tercapai.

Butir-butir pengamalan sila Pancasila berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003:

a) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b) Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c) Sila ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

e) Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

(Tap MPR no 1/MPR/2003)

Secara umum, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Pengalaman secara objektif

Pengamalan objektif dilakukan dengan menataati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Menurut Kaelan (Kaelan, 2010, p. 259) menyatakan bahwa pengamalan Pancasila yang obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara dan bidang-bidang

lainnya seperti ekonomi, politik, hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang.

Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara dalam menerapkannya. Setiap warga negara atau penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, jika menyimpang maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa artinya jika ada yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma hukum negara.

b. Pengalaman secara subjektif

Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi atau kelompok dalam berperilaku atau bersikap pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara subjektif dilakukan oleh siapa saja baik itu warga negara biasa, aparatur negara, kalangan elit politik maupun yang lainnya.

Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Adanya pengamalan secara subjektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bangsa dan negara.

Inti nilai-nilai Pancasila beserta Indikator kaedah implementasinya menurut Ketut Rindjin (Rindjin, 2012, pp. 192-193) sebagai berikut:

Pancasila	Nilai-nilai	Kaidah Implementasi
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	1. Ketaqwaan Personal	a) Sembahyang, berdoa, membaca buku suci, berguru pada tokoh agama. b) Mengakui kebebasan beragama/ berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	2. Ketaqwaan Sosial/ Publik	a) Menyanyangi semua makhluk ciptaan Tuhan YME b) Mengakui keberagaman agama / kepercayaan pada Tuhan YME c) Mempunyai toleransi agama/ kepercayaan pada Tuhan YME

		d) Membantu yang lemah, menderita, dan miskin.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	1. Kemanusiaan	<p>a) Mengakui kesamaan derajat manusia</p> <p>b) Menyayangi, menolong, kerja sama sesama manusia</p> <p>c) Mengakui kebutuhan rohani-jasmani dan individu-sosial</p> <p>d) Memegang teguh dan menerapkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan.</p>
	2. Keadilan dan Keberadaban	a) Memberlakukan semua manusia sama.

		<p>b) Memberlakukan aturan emas</p> <p>c) Menaati semua norma yang berlaku</p> <p>d) Mengakui hak atas perlindungan dari kekerasan, mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan.</p> <p>e) Berlaku sopan, santun, ramah, tamah dan rendah hati.</p>
3. Persatuan Indonesia	1. Persatuan	<p>a) Mengakui negara persatuan</p> <p>b) Menyatupadukan semua unsur yang berbeda</p> <p>c) Mengakui manfaat persatuan</p>

	2. Kecintaan pada Indonesia	<p>d) Mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>a) ACBI (Aku Cinta Bangsa Indonesia)</p> <p>b) ACTAI (Aku Cinta Tanah Air Indonesia)</p> <p>c) ACBI & BI (Aku Cinta Budaya Indonesia dan Bahasa Indonesia)</p> <p>d) ACPI (Aku Cinta Produk Indonesia)</p> <p>e) ABNKRI (Aku Bela NKRI)</p>
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan	1. Kerakyatan	a) Mengakui Daulat Rakyat

<p>dalam Permusyawaratan / Perwakilan</p>	<p>2. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan</p>	<p>b) Kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat</p> <p>c) Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.</p> <p>a) Mengakui Daulat Rakyat</p> <p>b) Kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat</p> <p>c) Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.</p>
<p>5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p>	<p>1. Pengakuan hak hidup manusia sesuai dengan</p>	<p>a) Menciptakan pekerjaan sendiri, tetapi pemerintah menciptakan</p>

	harkat dan martabatnya.	lapangan pekerjaan serta memberikan
	2. Pengakuan hukum kerja dan etos kerja	jaminan sosial. b) Mereka yang nganggur diberi
	3. Menganjurkan kerja gotong royong.	pelatihan kerja. c) Menerapkan kerja gotong royong dan
	4. Pengakuan <i>justitia distributive</i> dan <i>creative</i> .	yang kuat membantu yang lemah (system bapak/ anak angkat) d) Memberi imbalan/penghargaan dengan peran dan kontribusinya serta kreativitas yang inovatif

Tabel 1. Inti nilai-nilai Pancasila beserta indikator kaedah implementasinya

5. #PancasilaSelamanya

Pada era reformasi perkembangan situasi nasional cukup memprihatinkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul secara bergantian di seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak demokratisasi yang tidak terkendali dan tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila telah

memunculkan sikap individualistis yang sangat jauh berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mementingkan keseimbangan, kerjasama, saling menghormati, kesamaan, dan kesederajatan dalam hubungan manusia dengan manusia.

Hal ini juga dirasakan dan diungkapkan oleh mantan Presiden BJ Habibie dan Ibu Megawati dalam sambutannya di depan sidang MPR RI pada tanggal 1 Juni 2011 dalam rangka memperingati Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Dalam sambutannya Bapak BJ Habibie menyampaikan sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Ibu Megawati juga menyampaikan bahwa dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita.

Ekspresi dan kegundahan kedua tokoh nasional tersebut, tentu merupakan Bentuk kegelisahan yang harus dijadikan tolok ukur memudarnya pemahaman masyarakat terhadap nilai – nilai luhur Pancasila. Hingga saat ini, Pancasila masih tampak kokoh berdiri mempersatukan berbagai komponen bangsa, suku bangsa, golongan dan etnik di bawah NKRI. Namun, bangsa ini harus berani jujur untuk mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara mulai kehilangan roh dan jiwa

anak bangsanya. Bagi generasi penerus bukan suatu hal yang mudah mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dan pendiri bangsa dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional setiap jaman dan era kepemimpinan, sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus dalam menyikapi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa.

Di satu sisi, trauma generasi muda terhadap sikap politik pemerintahan orde baru, telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sementara disisi lain, era globalisasi beserta implikasinya telah merubah persepsi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Ancaman bagi bangsa dan negara, tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik, melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk ancaman yang lebih kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional.

Perkembangan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini menyumbang terjadinya krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pertama, dengan meraih kemerdekaan terciptalah kenyamanan hidup secara baru lepas dari ketidaknyamanan yang tadinya dialami dari penjajahan bangsa asing. Solidaritas yang terbangun melalui pergerakan nasional menghimpun orang-orang dari berbagai suku menghadapi musuh bersama. Begitu penjajahan sudah diatasi dengan kemerdekaan, nilai-nilai solidaritas yang menjadikan kita satu Indonesia perlahan-lahan redup. Kebhinnekaan tidak lagi disyukuri sebagai anugerah untuk

menyatukan energi sosial bagi upaya membangun dan mengembangkan kemerdekaan tetapi sebaliknya kebhinnekaan dicurigai sebagai biang kerok atau ideologi penyeragaman yang menghilangkan identitas suku, agama, ras, dan golongan. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar karena pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya sampai pada taraf verbalisme bahkan menjadi *lipservice* para pemimpin yang berperilaku bukan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara tetapi sebagai pemangku kekuasaan dan pejabat negara.

Lemahnya bangsa Indonesia melakukan refl eksi dan evaluasi nilai-nilai Pancasila di dalam menjalankan kehidupan sebagai anggota keluarga, komunitas, masyarakat, dan warga negara menjadi alasan kelamnya pengamalan Pancasila. Dunia pendidikan yang oleh para pendiri bangsa dan pemuka masyarakat dianggap sebagai ranah pembentukan watak dalam perkembangannya diisi oleh muatan pendidikan yang lebih berorientasi kepentingan ekonomi sehingga pendidikan menaikkan derajat persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi mengabaikan apa yang oleh tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara disebut *character building* dan secara politik diungkapkan Sukarno dalam upaya merespon pembangun itegrasi nasional sebagai *nation building*.

Pendidikan karakter mengutamakan nilai-nilai budaya untuk memperkuat kesadaran nasional sebagai bangsa. Hal ini harus menjadi titik tolak refl eksi dan evaluasi terhadap cara kita merespon pembangunan masyarakat dan politik menuju integrasi nasional yang lebih solid dan kuat. Absennya pendidikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan informal maupun formal tidak mustahil menghasilkan insan pembangunan yang tercerabut dari akar budayanya. Ilmu

pengetahuan dan teknologi tidak boleh dikembangkan lepas dari koridor pemberdayaan watak dan politik warga negara dalam realitas kehidupan yang kendati berbeda-beda namun satu sebagai sebuah bangsa. Sudah ada banyak reaksi terhadap kemerosotan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan di bawah ini dikemukakan dua tanggapan yang tidak hanya mengeluhkan krisis tetapi juga mendiagnosa krisis dengan mengajukan beberapa cara melakukan perbaikan dan resolusi.

a. Fakta dan Data Krisis Pancasila

Narasi kebencian dalam ruang publik menjadi begitu mudah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak dan di pihak lain pelemahan terhadap nilai-nilai fundamental dunia kehidupan oleh sistem pendidikan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi kapitalis ketimbang pendidikan karakter masyarakat dan bangsa sebagaimana dibicarakan Sukarno dan Ki Hajar Dewantara. Opini yang dikemukakan Munawir Aziz dalam Harian Kompas secara gamblang melukiskan ruang publik berlumuran “darah” kebencian. Beliau menunjukkan bahwa sebuah survei yang dilakukan bersama antara Riset Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia pada bulan April 2016 menunjukkan realitas akan adanya responden yang mengaku pernah berpartisipasi dalam ujaran kebencian dan siap melakukan kekerasan melalui aksi radikal terhadap 10 kelompok sasaran kebencian yakni: LGBT menempati peringkat tertinggi 26,1%, komunisme 16,7%, Yahudi 10,7%, Kristen 2,2%, Syiah 1,3%, Wahabi 0,5%, Buddha 0,4%, Cina 0,4%, Katolik 0,4%, dan Khonghucu 0,1%. Tergambar dari survei tersebut perilaku anti kebhinnekaan yang merefleksikan

sikap inklusif dari nilai-nilai Pancasila. 59,9% responden mengaku memiliki kelompok masyarakat yang dibenci dan 92,2% tidak setuju bahwa dari anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat publik. Lebih parah lagi 82,4% menolak hidup bertetangga dengan anggota kelompok yang dibenci.

Aziz mendiagnosis sebab-sebab narasi kebencian terjadi seiring dinamika politik 2017 yang memerekam tekad negatif kelompok bangsa yang satu mengujar kebencian terhadap kelompok yang lain dengan memanfaatkan rumah-rumah ibadah untuk memproduksi ceramah kebencian tersebut terutama menjelang pemilukada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dinamika pemilukada telah usai namun benih-benih kebencian tidak ikut lekang bersama usainya peristiwa politik pemilukada. Hadirnya teknologi komunikasi yang semakin canggih seakan merawat tumbuh kembangnya kebencian di satu pihak dan ketakutan di pihak lain.

Lembaga CSIS yang pada 20-30 Agustus 2017 melakukan survei atas 600 responden berusia 17-29 tahun dari 34 provinsi se-Indonesia mendapat secercah harapan dan optimism dari generasi milenial bahwa penghayatan dan pengalamalan nilai-nilai Pancasila masih dianggap perlu untuk mengoreksi perilaku antisosial. Hasil survei CSIS memperlihatkan 26,9% sangat optimis bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman mengatasi krisis dan pedoman penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara, 62,3% responden cukup optimis, 52% responden tidak setuju dan 32% responden kurang setuju untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 14–20 Mei 2017 menyebutkan ada sekitar 9,2 persen publik mengatakan bahwa khilafah merupakan dasar negara terbaik untuk Indonesia. Angka itu memang kecil jika dihitung dari selisih seratus dalam bilangan persentase. Namun, itu cukup besar jika dinyatakan dalam hitungan sampel yang merujuk pada jumlah orang per orang. Apalagi jika dihitung dari jumlah penduduk yang saat ini mencapai sekitar 261 juta. Maka, ada sekitar 25 juta orang Indonesia yang menginginkan sistem khilafah.

Angka tersebut sungguh mengkhawatirkan. Krisis Pancasila merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap Pancasila. Dalam konteks bernegara, gelombang krisis Pancasila tak kalah berbahaya dengan gelombang krisis ekonomi. Jika krisis ekonomi berakibat pada melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, krisis Pancasila berakibat pada runtuhnya kedaulatan negara.

Dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro Pancasila terus menurun. Hal ini berdasarkan survei yang digelar oleh LSI Denny JA beberapa bulan lalu. "Dalam waktu 13 tahun, publik yang pro Pancasila menurun sebanyak 10 persen," ujar peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa. Pada tahun 2005, publik yang pro Pancasila angkanya mencapai 85,2 persen. Kemudian, pada tahun 2010, angkanya menurun menjadi 81,7 persen. Setelah itu, pada tahun 2015, angkanya kembali menurun menjadi 79,4 persen. Akhirnya, pada tahun 2018, angkanya turun lagi menjadi 75,3 persen. "Meskipun masih mayoritas, akan tetapi penurunan 10 persen perlu menjadi perhatian," tambah Ardian.

Survei tersebut juga menemukan bahwa menurunnya publik pro Pancasila terasa di segmen warga berpenghasilan rendah dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta. Penurunan juga terjadi pada segmen masyarakat berpenghasilan menengah dengan penghasilan antara Rp 1 juta-Rp 2 juta. Selain di segmen berpenghasilan rendah, menurunnya publik yang pro Pancasila terjadi umumnya pada warga beragama Islam.

Pada tahun 2005, warga beragama Islam yang pro Pancasila mencapai 85,6 persen. Kemudian, pada tahun 2018, angkanya turun menjadi 74 persen, dengan demikian terjadi penurunan 11,6 persen. Untuk warga beragama lainnya angkanya cukup stabil di angka 81,7 persen pada 2005 dan di tahun 2018 angkanya 82,8 persen. Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Survei ini menggunakan metode *multistage random sampling* dengan 1.200 responden. Adapun *margin of error* sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Mind map

